

ABSTRAK

Dalam Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr, yang mana pelakunya adalah pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan pidana karena memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan dan melanggar Pasal 110 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dari ketiga putusan tersebut penjatuhan pidana berbeda terutama ukuran sanksi pidana dan yang menjadi permasalahan adalah apa yang menjadi dasar pemidanaan hakim dalam ketiga putusan tersebut sehingga menghasilkan pidana yang berbeda.

Disparitas putusan pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Dari ketiga putusan tersebut terjadinya disparitas putusan pidana karena setiap Majelis Hakim memiliki perbedaan dalam membuktikan dan memenuhi setiap unsur dalam pasal tersebut berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selain itu Majelis Hakim juga menggunakan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terutama jumlah benih jagung bantuan Pemerintah yang diperdagangkan pelaku usaha sebagai dasar pemidanaan. Kemudian Majelis Hakim pada ketiga putusan tersebut juga menggunakan dasar pemidanaan secara non yuridis didasarkan pada tujuan dari pemidanaan dan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pelaku usaha. Maka dari hal tersebut menyebabkan perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan benih jagung bantuan Pemerintah.

Kata Kunci : Disparitas, Dasar Pemidanaan, Pelaku Usaha, Memperdagangkan, Benih Jagung

ABSTRACT

In Decision Number 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Decision Number 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, and Decision Number 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr, where the perpetrators are business actors who have committed criminal acts due to trade in goods and/or services that are designated as goods and/or services that are prohibited from being traded and violate Article 110 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. Of the three decisions, the sentencing is different, especially the size of the criminal sanction and the problem is what is the basis for the judge's sentencing in the three decisions resulting in a different sentence.

Disparity in criminal decisions is the application of unequal sentences to the same crime (same offense) or to crimes of comparable seriousness without a clear justification.

Of the three decisions, there was disparity in criminal decisions because each panel of judges had differences in proving and fulfilling each element in the article based on the legal facts revealed in the trial. In addition, the Panel of Judges also used the evidence presented at the trial, especially the amount of maize seeds aided by the Government traded by business actors as a basis for sentencing. Then the Panel of Judges in the three decisions also used a non-juridical basis for sentencing based on the objectives of the sentencing and the aggravating and mitigating circumstances of the business actor. Therefore, this has led to differences in the punishment of business actors who trade corn seeds with the help of the Government.

Keywords : Disparity, Basis for Punishment, Business Actors, Trade, Corn Seeds